

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ahmad Fuady ,2014, *Jaminan Kesehatan Universal dan Pemenuhan Hak Kesehatan*, Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Franz Magnis Suseno, 2001, *Kuasa dan Moral*, Gramedia, Jakarta.
- Hamid A.S Attamimi, 1992, *Teori Perundang-undangan di Indonesia*, UI, Jakarta.
- Hasbullah Thabrany, 2016, *Jaminan Kesehatan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta.
- Miftachul Huda, 2009, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mohd. Solly Lubis, 1982, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Nur Nisaharini, 2015, *Satu Tahun Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional*, Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.
- Nurul Qamar, 2014, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Reschtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim, H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Suharizal & Muslim Chaniago, 2017, *Hukum pemerintah daerah setelah berlakunya UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi. 3 Cetakan.2, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja.

Sumber Lain (Jurnal, dan lain-lain)

Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Yustisia Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2014.

Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls*, Jurnal TAPIs Vo. 9 No. 2 Juli-Desember 2013.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, 2015, *Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016*, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dharmasraya, Dharmasraya.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, 2017, *Rencana Strategis Suku Anak Dalam Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018-2022*, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dharmasraya bekerjasama dengan Perkumpulan SSS Pundi Sumatera dan Perkumpulan Peduli, Dharmasraya.